Radar Bali

Bawaslu Siap Mengawasi

DENPASAR - Pilkada 2015 serentak sudah dilaunching Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kemarin (17/4). Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di enam kabupaten/kota Bali yang menggelar pilkada serentak pun menyatakan siap melakukan pengawasan. Seperti ditegaskan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali Ketut Rudia.

"Kami sudah siap melakukan pengawasan," tandas Ketua Bawaslu Bali Ketut Rudia kemarin.

Menurutnya, kesiapan Bawaslu dalam pengawasan itu salah satunya terkait anggaran pengawasan. Dikatakan, meski sempat menjadi pembahasan, namun persoalan anggaran pengawasan di dua kabupaten yakni Kabupaten Bangli dan Jembrana sudah bisa diuraikan. Sebagaimana diketahui, Panwaslu Jembrana dalam APBD Induk Jembrana 2015 mendapat jatah Rp 1,5 miliar. Jumlah tersebut dinilai kurang, karena dalam Pilkada 9 Desember 2015 Panwaslu akan membentuk petugas atau pengawas hingga ke tingkat TPS (tempat pemungutan suara). Menurut Rudia, kebutuhan anggaran untuk pengawasan di Pilkada Jembrana dan Bangli masing-masing Rp 3 miliar. **(pra/yor)**

Edisi : Sabtu, 18 April 2015.

Hal : 23

Radar Bali

Penerima Hibah Disebut Ilegal

DOK.RADAR BALI

Ketika muncul PHDI dengan disebut Ketuanya Sukada, kami tegaskan itu bukan PHDI resmi yang diakui oleh pemerintah atau umat berdasarkan mekanisme aturan yang berlaku. Yang benar PHDI dipimpin oleh Made Mulia almarhum dan saat ini Plt-nya Sukayasa."

Prof.Dr.Drs Gusti Ngurah Sudiana MSi, *Ketua PHDI Bali*

Soal Dugaan Korupsi Tirta Yatra ke India

DENPASAR- Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Badung pimpinan Sukada yang menerima dana hibah untuk *tirta yatra* ke India disebut tidak sah. Akibatnya, dana hibah itu pun diyakini ilegal. Hal itu diungkapkan oleh Ketua PHDI Bali Prof. Dr.Drs Gusti Ngurah Sudiana MSi, kemarin (17/4).

"Saya sebenarnya tidak mau masuk terlalu dalam, biar umat tidak resah. Namun, perlu kami luruskan kondisi ini agar tidak malah terkesan PHDI dapat hibah dana banyak kemudian bermasalah," ungkap Sudiana saat memberikan penjelasan.

Ngurah Sudiana mengatakan, PHDI di pusat secara struktur dipimpin oleh Ketua Sang Nyoman Suwisma ■

▸ Baca **Penerima...** *Hal 31*

Edisi : Sabtu, 18 April 2015.

Hal : 21 dan 31

Radar Bali

Sambungan

Dewan Minta Pemerintah Terbuka

■ **PENERIMA...**

Sambungan dari hal 21

Dengan Dharma Adyaksa atau Ketua Sabha Pandita Ida Pedanda Sebali Tianyar dan Ketua Sabha Walaka Putu Wirata Dwikora.

Kemudian untuk kepengurusan Bali ketuanya adalah Gusti Sudiana. Sedangkan di Badung, PHDI dipimpin oleh Ketua Made Mulia namun sudah meninggal dan saat ini Plt-nya adalah Wayan Sukayasa.

"Ketika muncul PHDI dengan disebut Sukada sebagai ketua, kami tegaskan itu bukan PHDI resmi yang diakui oleh pemerintah atau umat berdasarkan mekanisme aturan yang berlaku. Yang benar PHDI dipimpin oleh Made Mulia almarhum dan saat ini Plt-nya Sukayasa," ungkap Sudiana.

Dia mengatakan tidak tahu persis, bagaimana bisa muncul PHDI dengan Ketua Sukada. "Apa kepentingannya, tidak tahu. Yang jelas kami nyatakan itu tidak sah," ungkapnya.

Ketua Sabha Walaka PHDI Pusat Putu Wirata Dwikora, juga menyatakan hal yang sama. Dwikora secara tegas mengatakan PHDI yang dipimpin oleh Sukada itu ilegal. "Itu PHDI yang ilegal, kepengurusnaya tidak dilantik dan tidak mendapatkan SK dari struktur PHDI pusat sampai daerah. Tidak tahu siapa yang membuat, dan apa kepentingannya," ungkapnya.

Dwikora secara tegas mengatakan, ketika PHDI ini muncul sempat ada langkah untuk melakukan gugatan. Namun, tetap saja bertahan. Atas kondisi ini dibiarkan saja lantaran suatu ketika bisa akan bermasalah secara hukum. Akhirnya, kondisi ini terbukti. "Ternyata sekarang kesandung masalah hukum, tanpa kami gugat," ungkap Dwikora.

"Kami sudah sempat sarankan, jika terus ada aliran dana dari pemerintah nanti akan kesandung kasus korupsi," ujar Dwikora.

Pria yang juga ketua BCW (Bali Corruption Watch), ini mengatakan saat ini jelas - jelas ada penyimpangan. Lantaran bupati Badung menghibahkan dana ke lembaga yang tidak resmi. "Kalau penyimpangan paling jelas sekarang, bupati menghibahkan dana kepada lembaga yang tidak sah. Ini menjadi kerugian negara. Mungkin juga ada penyimpangan lain yang dibidik kejari," imbuhnya.

Selain itu, jika kejari tegas dalam kasus ini dia yakin akan mendapatkan unsur korupsi. "Asalkan ujung-ujungnya tidak masuk angin, pasti nanti ada penyimpangannya ini," imbuhnya.

Sementara itu, Sukada ketika dikonfirmasi tidak memberikan jawaban. Saat dihubungi via telepon, ponselnya aktif tapi tidak dijawab.

Seperti halnya berita sebelumnya, Kejari Denpasar mengendus dugaan korupsi dalam agenda *tirta yatra* ke India. Awalnya *tirta yatra* di Inspektorat yaitu ke Gunung Salak yang dibidik. Namun, kini di Dinas Kebudayaan yaitu ke Inda. Empat pejabat itu adalah Kadis Kebudayaan IB Anom Basma, Kepala Inspektorat Ni Luh Suryanti, Kabag Hukum Komang Budi Argawa, dan

Edisi : Sabtu, 18 April 2015

Hal : 21 dan 31

Radar Bali

Sambungan.

Kabag Keuangan Ketut Gede Suyasa. Anggaran ke India mencapai Rp 900 juta lebih.

Penyelidikan kasus dugaan korupsi dana *tirta yatra* ke India oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar ke Badung membuat kalangan Dewan Badung ikut prihatin. Ketua Komisi III DPRD Badung Nyoman Satria mengaku prihatin dengan kasus yang menimpa Pemkab Badung yang selama ini dikenal "bersih". Sebagai wakil rakyat, Satria meminta agar eksekutif yang terkait masalah ini bisa transparan dan kooperatif dengan kejaksaan.

"Apa yang dibutuhkan kejaksaan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan harus didukung. Pemkab harus kooperatif dan terbuka," ujar Satria kepada koran ini kemarin.

Politisi PDI Perjuangan asal Banjar Alangkajeng Mengwi, ini menegaskan, keterbukaan bisa membantu pembuktian bahwa pemerintah memang tidak bersalah. Karena itu, sikap terbuka dan tidak berbelit-belit pemerintah sangat diharapkan.

Namun demikian, Satria meyakini jika Pemkab Badung tidak benar melakukan penyelewengan dana seperti yang diduga kejaksaan. Katanya, pejabat Badung sudah terlatih dan profesional dalam membuat anggaran. Selain itu, pejabat di Badung juga mendapat penghasilan lebih dari cukup. "Kalau penyelewengan saya kurang yakin, mungkin hanya kesalahan administrasi. Karena apa? Karena selama ini pejabat di Badung sudah mendapat penghasilan lebih dari cukup. Jadi, kecil untuk niat korupsi," sentilnya.

Satria berharap ke depan pemkab lebih hati-hati dalam menggunakan anggaran. Dia menyarankan pemkab melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan instansi terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebelum menggunakan anggaran. "Biar tidak terjebak lagi harus dikonsultasikan dengan BPK. Kalau boleh jalan, kalau tidak boleh berarti stop," tukas pria berkacamata itu.

Sementara itu, Ketua Komisi I yang membidangi hukum Nyoman Ardana saat dikonfirmasi berharap pemerintah berani meladeni apa yang disangkakan kejaksaan. "Selama belum ada pembuktian yang sah dan tetap, saya rasa pemerintah harus berani membuktikan, kalau dipanggil harus siap," ujar politisi asal Kapal itu.

Berarti pemerintah tidak perlu takut dan harus blak-blakan? "*Ya*, tidak usah seperti itu. Kalau belum ada alat bukti yang kuat jangan diekspose dulu, kasihan harga diri dan nama baik orang," papar Ardana.

Seperti halnya Satria, Ardana yakin jika pemerintah tidak mungkin melakukan penyelewengan dana alias korupsi. Selama ini, terang Ardana, belum ada catatan buruk terhadap Pemkab Badung. "Saya bukan membela pemerintah, tapi harus ada faktanya dulu," pungkasnya. **(art/san/yes)**

Hal. 3

Edisi	:	Sabtu, 18 April 2015
Hal	:	21 dan 31

Radar Bali

Vaksin Rabies Habiskan Rp 1 M

AGUNG BAYU/BALI EXPRESS

VAKSINASI: Petugas sedang memberi vaksin ke seekor kucing di Banjar Dukuh, Dalung, kemarin.

Kemarin Tim Disnakanlut Datangi Dalung

MANGUPURA – Untuk pertama kalinya pada tahun 2015 ini vaksinasi anjing secara massal dilakukan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan (Disnakanlut) Badung. Jumat kemarin (17/4), pukul 09.00 di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara, tim dari Disnakkalaut keliling mendatangi rumah penduduk yang memiliki anjing. Kesehatan Hewan Disnakanlut Badung, I Gde Asrama mengungkapkan, dipilihnya Dalung untuk melakukan vaksinasi masal dilatarbelakangi populasi "si guk-guk" di Dalung yang cukup banyak.

Di Badung sendiri populasi anjing diperkirakan mencapai 55 ribu ekor. Populasi terbanyak yakni Kuta Utara, Mengwi, Abiansemal Petang, dan Kuta. Meski demikian di wilayah tersebut relatif terkendali. "Kuta Selatan populasinya lebih sedikit tetapi masuk zona merah rabies. Sehingga tingkat kerawanannya sangat tinggi. Makanya untuk Kuta Selatan ada tim khusus yang melakukan vaksinasi di sana," tutur Asrama.

Ditambahkan, vaksinasi di Dalung ini akan terus berlanjut ke tempat lain sampai terakhir bulan Juli. Selama tahun 2015, sharing anggaran dari pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi serta pusat. Program vaksinasi selama tiga bulan kedepan menghabiskan anggaran sekitar Rp 1 miliar. "Program vaksinasi akan terus dilakukan dari April sampai Juli. Sasaran kami seluruh wilayah di Badung seperti

Hal-1

Edisi : Sabtu, 18 April 2015.

Hal : 24

Radar Bali

sambungan

Petang, Abiansemal, Mengwi, Kuta Utara, Kuta, dan Kuta Selatan," imbuhnya.

Terkait teknis pelaksanaan vaksinasi dari pintu ke pintu ini, Asrama menyebut lebih efiesin. Dijelaskan, dengan model jemput bola petugas dari Disnakanlut menyebar ke masing-masing banjar lalu masuk ke rumah-rumah warga. Dengan pola seperti ini diharapkan seluruh anjing warga mendapat vaksinasi secara gratis dari pemerintah. "Dan langkah ini lebih efektif sebab bila warga yang diminta berkumpul di banjar khawatirnya warga enggan dengan bermacan alasan," ungkapnya.

Soal target, Asrama menyebut target vaksinasi hanya 50.000 ekor saja. Asrama menjelaskan, itu berkenaan dengan masalah anggaran. Sehingga, sisanya atau tinggal 5.000 lagi akan diprogramkan pada APBD perubahan tahun 2015. "Satu ekor anjing itu anggaran vaksinasinya Rp 20.000 jadi tinggal dikalikan saja 50.000 ekor anjing, totalnya Rp 1 miliar," pungkasnya.

Sementara itu, Dinas peternakan Perikanan, dan Kelautan Kota Denpasar berencana melakukan vaksinasi masal terhadap hewan peliharaan untuk mencegah rabies di wilayah Kota Denpasar. Rencana tersebut akan digelar mulai tanggal 20 April sampai 9 Juni mendatang, hal tersebut disampaikan langsung oleh Dinas peternakan Perikanan, dan Kelautan Kota Denpasar AA Bayu Brahmasta Jumat (17/4) kemarin.

Vaksinasi tersebut akan dilakukan secara bertahap, dari rumah ke rumah. Awal vaksinasi tersebut dilakukan pertama kali di wilayah Renon, mengingat daerah ini merupakan daerah yang paling potensial terjadinya penyebaran virus rabies. "'Vaksinasi Rabies masal ini sebagai langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya penyebaran rabies di wilayah Kota Denpasar. sebab di beberapa wilayah Bali angka penderita rabies sudah cukup banyak," ujarnya.

Vaksinasi masal tersebut dilakukan bukan hanya kepada hewan jenis anjing saja, melainkan beberapa hewan peliharaan seperti kucing dan kera. Nantinya jika tim vaksinasi mendapati anjing liar maka akan dilakukan penulupan untuk diberikan vaksinasi. "'Kami akan menulup anjing liar jika kami menemukan. Selanjutnya anjing tersebut akan kami berikan vaksinasi dan mengambil sampelnya untuk diteliti apakah mengandung unsur rabies atau tidak," terang Bayu.

Ditambahkannya jika warga masyarakat Denpasar untuk mendukung penuh kegiatan ini, dan juga dapat mempersiapkan hewan peliharaannya saat tim vaksinasi mengunjungi rumah dari masing-masing. "Tim vaksinasi rabies tersebut terdapat dokter hewan praktisi dan instansi terkait. Nantinya dalam satu hari kegiatan vaksinasi tersebut akan dilakukan di delapan Banjar," imbuhnya.**(san/zul/han)**

Hal. 2

Edisi : Sabtu, 18 April 2015

Hal : 24